



KOMDIGI



**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkah dan Rahmat-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar (Dinas Kominfotiksan) dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 yang akan digunakan sebagai pedoman Dinas Kominfotiksan untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Penyusunan Renja adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2029. Rencana kerja ini menyajikan tujuan dan sasaran beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar pada tahun 2026. Renja 2026 disusun berdasarkan target kinerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja Tahun 2026 ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Blitar, 15 Agustus 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR**



HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Renja Perangkat Daerah	11
BAB II	17
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU	17
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	38
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III	73
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	76
3.3 Program dan Kegiatan.....	89
BAB IV	114
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	114
BAB V	143
PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

Table 2.1	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025	16
Table 2.2	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar	31
Table 2.3	
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Kabupaten Blitar	40
Tabel 2.4	
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	46
Table 3.1	
Persentase Capaian IKU Tahun 2024 dan Target Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	55
Tabel 3.2	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	57
Tabel 3.3	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Blitar	66
Table 4.1	
Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peraturan ini adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan waktu dan substansinya. Rencana pembangunan ini juga dibedakan menurut jenjang, yaitu tingkat Pemerintah Pusat dan tingkat Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan, perangkat daerah memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk waktu 1 tahun. Kedua dokumen menjadi dokumen resmi yang harus disusun dan digunakan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan teknis dan sebagai pedoman bagi seluruh kepala bidang dalam mengeluarkan anggaran (DPA) dan sekaligus

untuk menyusun laporan pertanggungjaaban pengeluaran dana. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam renja harus bersumber dari yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis PD. Renja harus disusun dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis perangkat daerah. Perubahan dapat dilakukan pada nilai pagu sub kegiatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan realisasi biaya dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sedangkan, untuk indikator kinerja harus sinkron dengan indikator kinerja di dalam dokumen rencana strategis.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD PD yang bersangkutan. Renja PD disusun beriringan dengan rancangan awal RKPD.

Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfotiksan) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan sumber dana.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
16. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomoe 82);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar (RPJMD) Kabupaten Blitar;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Blitar 2025-2029; dan
27. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : B/027.02.04.01/287/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan perangkat daerah dalam pembangunan daerah. Penyusunan Renja tahun 2026 dipergunakan pula untuk mensinergikan kinerja yang terjadi setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan renja PD di tahun 2025 serta

sebagai tolok ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Renja tahun 2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kominfo tahun 2025-2029 dalam rencana tahunan yaitu tahun 2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD serta merancang kebijakan dan strategi percepatan pembangunan sesuai dengan perubahan kondisi terkini.
4. Sebagai dasar acuan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Renja Perangkat Daerah

Secara garis besar, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi

APBD untuk PD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Pokok Pikiran DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Visi Misi Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan Inputan Renja pada SIPD Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada bagian ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan melihat informasi mengenai suatu kegiatan, program, kinerja agar dapat menentukan tingkat keberhasilan, efektivitas dan efisiensi dari suatu perencanaan serta guna memberikan perbaikan dimasa yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kajian (Reviu) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan pada penyusunan renja Perangkat Daerah disahkan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, dimuat dalam tabel berikut ini:

Table 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	100%	BB	BB	100.00%
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	100	92	94	94	100%	96	94	94.00%
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3	3	100.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	4	4	100.00%
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	92	94	94	100%	99	95	95.00%
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	27	28	28	100%	28	28	74.77%
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	1	1	1	100%	1	1	50.00%
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	7	7	7	100%	7	7	100.00%
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	92	94	94	100%	96	94	94.00%
01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	27	28	28	100%	28	28	74.77%
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan.	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	-	3	-	0	0%	0	3	100.00%
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi	100	92	94	94	100%	96	94	94.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Umum Perangkat Daerah								
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	4	10	250%	10	10	100.00%
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	14	3	14	467%	14	14	100.00%
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	2	6	300%	6	6	100.00%
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	6	8	8	100%	8	7	91.67%
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100.00%
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100.00%
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	100	92	94	94	100%	96	94	94.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	14	14	14	100%	14	14	100.00%
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92	94	94	100%	94	93	93.33%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100.00%
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100.00%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100%	1	1	100.00%
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	100	92	94	94	100%	96	94	94.00%
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	15	15	12	80%	12	13	108.33%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100.00%
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemda survey	85.60	86	90	88	98%	90	88	102.80%
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	93.20	60	90	85	94%	90	80	85.84%
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5							
2.16.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3	-	-	0	0%	0	-	0.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20	-	-	0	0%	0	-	0.00%
2.16.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8	1	1	1	100%	1	1	100.00%
2.16.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	2	2	2	100%	2	2	100.00%
2.16.02.2.01.0021	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	129	1	1	1	100%	99	101	78.29%
2.16.02.2.01.0023	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	5,107	-	-	0	0%	0	-	0.00%
2.16.02.2.01.0024	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi	64	-	-	0	0%	0	-	0.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		mengikuti bimtek/pelatihan								
2.16.03	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan	2	50	50	70	140%	90	70.00	3500.00%
		Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	2	50	50	100	200%	100	83.33	4166.67%
2.16.03.2.01	KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.01.0004	SUB KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2	3	154	154	100%	1	52.66666667	2633.33%
2.16.03.2.02	KEGIATAN: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	20	3	23	22	96%	23	16	80.00%
		- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan;	4							
		- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah;	20							
		- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;	20							
		- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;	20							
		- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;	100							

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparaturnya dan masyarakat;	2							
		- Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;	95							
2.16.03.2.02.0013	SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10	0	0	0	0%	25	8.33	83.33%
2.16.03.2.02.0019	SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	4	0	0	0	0%	1	1.00	25.00%
2.16.03.2.02.0024	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.16.03.2.02.0025	SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	4	0	0	0	0%	0	-	0.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.02.0026	SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.16.03.2.02.0028	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4	0	0	0	0%	1	1.00	25.00%
2.16.03.2.02.0032	SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	4	52	52	0	0%	31	27.67	691.67%
2.16.03.2.02.0033	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.16.03.2.02.0034	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	0	0	0	0%	3	3.00	60.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.02.0036	SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	52	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.16.03.2.02.0037	SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	4	0	1	0	0%	0	-	0.00%
2.16.03.2.02.0038	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	1	1	1	0	0%	52	17.67	1766.67%
2.16.03.2.02.0039	SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	4	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.16.03.4.02.0015	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	4	3	0	0	0%	0	3.00	75.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.20.02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	97	70	70	80	0%	70	73.33	75.60%
2.20.02.2.01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	97	70	52	52	100%	52	58.00	59.79%
2.20.02.2.01.0017	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100	4	5	0	0%	100	34.67	34.67%
2.20.02.2.01.0018	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100	1	1	0	0%	100	33.67	33.67%
2.20.02.2.01.0019	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	0	0	0	0%	60	60.00	60.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.20.02.2.01.0020	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	126	0	0	0	0%	54	54.00	42.86%
2.20.02.2.01.0021	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	0	0	0	0%	30	30.00	30.00%
2.21.02	PROGRAM : Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	60	70	100	100	100%	100	90.00	150.00%
2.21.02.2.01	KEGIATAN : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	2	70	70	75	107%	80	75.00	3750.00%
2.21.02.2.01.0005	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	1	1	100%	1	1.00	100.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.21.02.2.01.0007	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	52	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.21.02.2.01.0008	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2	0	0	0	0%	0	-	0.00%
2.21.02.2.02	KEGIATAN : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	55%	0	0	0	0%	0	-	0.00%

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.21.02.2.02.0002	SUB KEGIATAN : Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	12	0	0	0	0%	0	-	0.00%

Dalam hal capaian kinerja kegiatan seperti yang terdapat dalam tabel di atas pada tahun 2025 rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan mencapai di atas 90% bahkan banyak yang melaksanakan kinerjanya hingga 100% (90,...%). Hal ini menandakan bahwa, perangkat daerah sudah menjalankan kinerjanya dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi target yang akan di capai. Target ini mengartikan serapan anggaran yang diberikan berjalan dengan optimal, dan yang dianggarkan telah dilaksanakan untuk memenuhi pelayanan publik dalam periode tahun 2025.

Tahun 2026 merupakan awal tahun berjalannya pelaksanaan kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, dimana tahun 2026 pertama dari periode 2025-2029. Pencapaian target tahun 2026 adalah masa gelombang efisiensi (rasionalisasi dan efisiensi anggaran), dimana pengurangan anggaran berakibat pada penyesuaian rencana aksi bidang-bidang pengampu program. Meskipun demikian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan oleh bidang-bidang sudah banyak yang melebihi target yang ditetapkan dalam renstra dan renja 2026, sehingga dapat terus ditingkatkan capaiannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan lainnya;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Kominfo;

- c. Penyusunan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo.

Dalam melaksanakan pelayanan didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kominfo juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia. Untuk pelaksanaan kegiatannya Dinas Kominfo bekerja sama juga dengan RTIK dan LPPL Persada. Kedua organisasi ini dibawah binaan Dinas Kominfo yang sebagai tugasnya untuk membantu Dinas Kominfo dalam penyebaran informasi ke masyarakat dan juga untuk membantu dalam bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia agar pemanfaatan teknologi tidak sia sia.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan layanan publik berbasis elektronik. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3 terlampir :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :

Table 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B	BB	BB 73,5	BB 74,5	B	BB	BB 73,5	BB 74,5	Evaluasi TIM SAKIP Pemerintah Daerah
2	Nilai Indeks SPBE			4	4,38	1,71 - 2,01	1,71 - 2,01	3,77	-	1,71 - 2,01	1,71 - 2,01	Evaluasi SPBE Tahun 2025 akan dilaksanakan bulan September-Oktober Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar untuk IKU belum sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Kominfo karena berbagai hal, yaitu adanya masa transisi perubahan IKU mengikuti RPJMD 2021-2026 dan adanya perubahan parameter indikator penilaian terhadap Indeks SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Pemerintah Digital. Perubahan parameter ini berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, dampaknya nilai Indeks SPBE rata-rata seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan. Maka, berdasar hasil rapat internal disepakati untuk melakukan penurunan target IKU sebelumnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Tim Koordinasi Nasional berupaya meningkatkan keulaitas Penyelenggaraan SPBE, salah satunya melakukan penguatan pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk Indeks SPBE. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Blitar sebenarnya mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2023 dengan nilai 3,63 menjadi 3,77 pada tahun 2024 dengan predikat "Sangat Baik". Capaian ini terus meningkat pada tahun 2024 yaitu menjadi 4,38 poin.

Pada tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator dalam penilaian SPBE, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE sebesar 2,76 atau masuk kategori "Baik". Adapun Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar kembali turun menjadi sebesar 2,61 atau masuk kategori "Baik". Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,76, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, dari 4 domain penilaian SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE), domain

Manajemen SPBE memiliki nilai yang terendah. Domain ini terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, termasuk Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data. Ke depan, aspek-aspek inilah yang perlu diperkuat kinerjanya, terlebih dengan kebijakan satu data, maka Manajemen Data SPBE menjadi penting karena menentukan kualitas pengelolaan data sehingga dapat diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, capaian naik secara sangat signifikan, dimana skor Indeks SPBE Kabupaten Blitar menjadi 3,63 poin, yang mana angka ini mampu mencapai target kinerja nilai Indeks SPBE sebesar 3,00 poin atau target kinerja IKU daerah tercapai kinerja sebesar 121% di tahun 2023. Kenaikan skor nilai Indeks SPBE ini diikuti dengan kenaikan skor komponen/variabel Indeks SPBE, yaitu indeks Tata Kelola SPBE sebesar 3,60 poin dan nilai layanan SPBE sebesar 4,07 poin. Sementara di Tahun 2024 capaian nilai SPBE meningkat sebesar 0,14 poin yaitu menjadi 3,77.

Identifikasi permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2026 ada 4 hal, yaitu *pertama*, belum optimalnya capaian Indeks SPBE khususnya untuk komponen/ variabel indeks Tata Kelola SPBE dan nilai layanan SPBE; *kedua*, cakupan wilayah/ ruang publik terkoneksi internet masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk penguatan program *smart city*; *ketiga*, peningkatan kualitas sistem jaringan untuk meningkatkan kecepatan akses dan layanan publik oleh perangkat daerah dan *keempat*, peningkatan kualitas nilai keterbukaan informasi publik daerah. Sementara di Tahun 2026 identifikasi permasalahan lebih berat pada kurangnya komitmen pimpinan OPD pendukung lain serta kualitas SDM pelaksana di Dinas Kominfo/teknis maupun perangkat daerah lain yang *supporting*. Adapun target capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar di tahun 2025 adalah 4,38. Namun pada tahun 2026, terjadi perubahan indikator dari SPBE menjadi Indeks

Pemerintahan Digital (Pemdigi), sehingga target tahun 2026 disesuaikan yaitu menjadi 2. Perubahan ini sebagai respon kebijakan dari Surat Pembinaan Pemdigi dari Kementerian PAN dan RB Tanggal 21 April 2025. Hal ini tentunya memerlukan usaha dan kerja keras serta kolaborasi yang harmonis dari seluruh pihak. Maka dari itu di tengah gelombang efisiensi anggaran ini diharapkan komitmen pimpinan menjadi motivasi yang luar biasa untuk meningkatkan capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo sebagaimana ditampilkan pada 2.1 dan 2.2. maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Sebagaimana diketahui bahwa, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Sehingga teknologi informasi dan komunikasi juga akan mengalami perubahan-perubahan indikator sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja IKU yang hendak dicapai. Dengan sebab seperti ini, menyebabkan kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya reviu dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas. Selain itu, adanya perubahan parameter indikator penilaian terhadap Nilai Indeks SPBE (Pemerintah Digital/Pemdigi) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami capaian penurunan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfo tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet diseluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfotiksan;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur khususnya dalam bidang keamanan informasi seiring dengan makin maraknya aksi kejahatan *cyber* untuk mengambil berbagai data-data kegiatan pemerintahan dan literasi digital bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;

5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pendukung penyelenggaraan SPBE di masing-masing perangkat daerah serta komitmen pimpinan yang harus semakin diperkuat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan clean governance telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kab Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan kualitas sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.
6. Keterbatasan jumlah SDM aparatur dalam bidang Teknologi Informasi di khususnya untuk mengelola infrastruktur jaringan TI

dan menangkal berbagai potensi serangan kejahatan dunia maya (cyber crime).

7. Perkembangan dunia TIK yang sangat cepat dan massif, berdampak pada tingkat kemampuan kompetensi SDM aparatur bidang TIK yang harus diupdate.
8. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran aparatur dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur



kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan juga mendukung SDG's. Analisis yang dilakukan telah berkontribusi guna mencapai indikator SDG's goal 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfotiksan tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfotiksan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi TIK perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, pasti, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet di seluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfo;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur khususnya dalam bidang keamanan informasi seiring

dengan makin maraknya aksi kejahatan *cyber* untuk mengambil berbagai data-data kegiatan pemerintahan.

5. Dalam situasi yang mulai membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19 dan mulai stabilnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, diharapkan kualitas layanan Dinas Kominfo semakin baik karena menjadi bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Identifikasi permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2024 ada 4 hal, yaitu *pertama*, belum optimalnya capaian Indeks SPBE khususnya untuk komponen/ variabel indeks Tata Kelola SPBE dan nilai layanan SPBE; *kedua*, cakupan wilayah/ ruang publik terkoneksi internet masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk penguatan program *smart city*; *ketiga*, peningkatan kualitas sistem jaringan untuk meningkatkan kecepatan akses dan layanan publik oleh perangkat daerah dan *keempat*, peningkatan kualitas nilai keterbukaan informasi publik daerah. Sedangkan pada tahun 2025 identifikasi permasalahan Nampak pada kurangnya kualitas SDM pelaksana penyelenggaraan SPBE dan juga komitmen pimpinan perangkat daerah.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026
Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	BB (73,5)	5.322.830.981,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	BB (73,5)	5.322.830.981,00	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	100	51.132.647,85	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	100	51.132.647,85	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	13.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	13.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	29.582.647,85	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	29.582.647,85	
	Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	1	1.050.00	Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	1	1.050.00	
	Penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral	Kab. Blitar	Jumlah data statistik sektoral yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	53	7.500.000	Penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral	Kab. Blitar	Jumlah data statistik sektoral yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	53	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Daerah yang tepat waktu	100	4.258.264.784,80	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	4.258.264.784,80	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	4.228.900.834,80	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	4.228.900.834,80	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	28.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	28.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	1.363.950,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	1.363.950,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	90.488.126,68	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	90.488.126,68	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	90.488.126,68	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	90.488.126,68	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	273.560.041,99	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	273.560.041,99	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10	4.513.760,67	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10	4.513.760,67	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	n Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan			an Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	21.722.473,23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	21.722.473,23	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	92.084.844,82	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	92.084.844,82	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	27.725.224,28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	27.725.224,28	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	125.538.968,69	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	125.538.968,69	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1.974.770,29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1.974.770,29	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai	100	31.936.985,89	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai	100	31.936.985,89	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Daerah		standar dan berfungsi dengan baik			Urusan Pemerintah Daerah		standar dan berfungsi dengan baik			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	31.936.985,89	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14	31.936.985,89	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	431.149.309,46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	431.149.309,46	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	66.620.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	66.620.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	361.549.309,46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	361.549.309,46	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.980.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.980.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi baik	100	186.299.084 .34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi baik	100	186.299.084.34	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Sarana Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	128.910.000, 00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Sarana Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	128.910.000,00	
	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1	57.389.084,3 4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1	57.389.084,34	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Blitar	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas	85,60	2.062.077.9 90,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas	85,60	2.062.077.990, 00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			informasi publik pemda survey					informasi publik pemda survey			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	93,20 5	2.062.077.990,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	93,20 5	2.062.077.990,00	
	Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Blitar	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3	51.551.949,75	Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Blitar	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3	51.551.949,75	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20	41.241.559,80	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	20	41.241.559,80	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8	179.400.785,13	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8	179.400.785,13	
	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	233.014.812,87	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2	233.014.812,87	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi	Kab. Blitar	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	129	1.340.350.693,50	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi	Kab. Blitar	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun	129	1.340.350.693,50	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			media berbayar sesuai kriteria/juknis					pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Blitar	Jumlah Konten Informasi Publik	5.107	154.655.849, 25	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Blitar	Jumlah Konten Informasi Publik	5.107	154.655.849,25	
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	64	61.862.339,7 0	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	64	61.862.339,70	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Blitar	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemmerintah	1,71 - 2,01	5.055.743.9 623	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemmerintah	1,71 - 2,01	5.055.743.963	
			Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	1,71 - 2,01				Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	1,71 - 2,01		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kab. Blitar	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat	1	75.836.159, 44	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kab. Blitar	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah	1	75.836.159,44	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		dan sub domain di lingkup pemerintah daerah			Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah			
	SUB KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2	75.836.159,44	SUB KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2	75.836.159,44	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	20 kebijakan	4.979.907.803,06	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	20 kebijakan	4.979.907.803,06	
			- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan;	4				- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan;	4		
			- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah;	20				- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah;	20		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;	20				- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;	20		
			- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;	20				- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;	20		
			- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;	100				- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;	100		
			- Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparatur dan masyarakat;	2				- Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparatur dan masyarakat;	2		
			- Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;	95				- Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;	95		
	SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Blitar	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10	34.859.354,62	SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kab. Blitar	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10	34.859.354,62	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	4	149.397.234, 09	SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	4	149.397.234,09	
	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Blitar	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	24.899.539,0 2	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Blitar	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52	24.899.539,02	
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Blitar	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	4	149.397.234, 09	SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kab. Blitar	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	4	149.397.234,09	
	SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai	1	39.839.262,4 2	SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai	1	39.839.262,42	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kewenangan Dinas Kominfo					kewenangan Dinas Kominfo			
	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Blitar	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4	149.397.234,09	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Blitar	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4	149.397.234,09	
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Blitar	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	4	388.432.808,64	SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kab. Blitar	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	4	388.432.808,64	
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1	149.397.234,09	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1	149.397.234,09	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Kab. Blitar	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	24.899.539,0 2	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Kab. Blitar	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	24.899.539,02	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	Kab. Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	52	3.286.739.15 0,02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	Kab. Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	52	3.286.739.150,0 2	
	SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	4	189.236.496, 52	SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	4	189.236.496,52	
	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Kab. Blitar	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi	4	229.075.758, 94	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Kab. Blitar	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi	4	229.075.758,94	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten atau Kota Cerdas		penyelenggaraan Kabupaten Cerdas			Kabupaten atau Kota Cerdas		penyelenggaraan Kabupaten Cerdas			
	SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	4	39.839.262,42	SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	4	39.839.262,42	
	SUB KEGIATAN: Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	0	-	SUB KEGIATAN: Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	0	-	
	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Kab. Blitar	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar	0	-	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Kab. Blitar	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar	0	-	
	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan	Kab. Blitar	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	4	124.497.695,08	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan	Kab. Blitar	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	4	124.497.695,08	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	edukasi literasi digital					edukasi literasi digital					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart (%)	97	815.000.000,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart (%)	97	815.000.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	97	815.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	97	815.000.000,00	
	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100	122.250.000,00	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100	122.250.000,00	
	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode	100	122.250.000,00	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas	100	122.250.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			referensi dan/atau data induk.					data dan kode referensi dan/atau data induk.			
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	146.700.000, 00	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	146.700.000,00	
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	126	301.550.000, 00	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	126	301.550.000,00	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	122.250.000, 00	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Blitar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100	122.250.000,00	
	PROGRAM Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	60	365.000.000 ,00	Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	60	365.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	2	300.000.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	2	300.000.000,00	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	35.000.000,00	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	35.000.000,00	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	52	230.000.000,00	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	52	230.000.000,00	
	SUB KEGIATAN : Penetapan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Blitar	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	2	35.000.000,00	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Kab. Blitar	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	2	35.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah		Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian			Persandian Pemerintah Daerah		Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian			
	Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Blitar	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	55	65.000.000,00	Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab. Blitar	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	55	65.000.000,00	
	SUB KEGIATAN : Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	12	65.000.000,00	SUB KEGIATAN : Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	12	65.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah					berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah			
	Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral										
	Penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral										

CATATAN:

Terdapat penambahan 2 Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1. penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral**
- 2. Penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral**

Penambahan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Bappedalitbang Kab. Blitar sebagai tindak lanjut dari temuan Provinsi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan atas bawah (bottom-up palnning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Blitar untuk bahan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas, hasil penelaahan terhadap kesesuaian program/kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

Nama SKPD: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	Tersusunnya Dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistic sectoral	
	Penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral	Kab. Blitar	Jumlah data statistik sektoral yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	Terkumpulnya data statistic sectoral dan diperiksa lingkup perangkat daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapaiannya peningkatan kapasitas pegawai	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Kecukupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya bahan bacaan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Terlaksananya pemenuhan pengadaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya kecukupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Blitar	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	Terwujudnya badan publik dengan kategori informatif dan kematangan layanan pengaduan publik dengan nilai maksimal	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai skor kepuasan masyarakat atas layanan informasi	
	Sub Kegiatan Relasi Media	Kab. Blitar	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Terlaksananya Relasi Media	
	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	
	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
			komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi	Kab. Blitar	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kab. Blitar	Jumlah Konten Informasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Konten	
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Blitar	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
3.	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Blitar	Nilai Aspek Teknologi Digital (Skor)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik akibat kemudahan akses melalui platform digital	
		Kab. Blitar	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Skor)		
	KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	-
	SUB KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi atau modul layanan digital yang dikembangkan; - Dokumen perencanaan dan evaluasi layanan digital; - Sistem integrasi data antar layanan digital; - Sertifikasi hak cipta pengembangan layanan digital; - Panduan atau SOP penggunaan layanan digital; - Laporan hasil pelatihan atau sosialisasi layanan digital; - Pembaruan perangkat lunak atau infrastruktur layanan digital; - Dashboard monitoring kinerja layanan digital; 	
	KEGIATAN: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	Integrasi sistem aplikasi ke dalam satu portal	
			- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan;		



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
			- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah;		
			- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;		
			- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;		
			- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;		
			- Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparatur dan masyarakat;		
			- Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;		
	SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		
	SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		
	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
	Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali		
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	-	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	-
	SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas		
	SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah		
	SUB KEGIATAN: Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk		
	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM		Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar		
	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital		Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital		
4.	PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
			standart (%))	statistik sektoral daerah	
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadada statistik sektoral sesuai standart	Tersedianya data statistik sektoral sesuai standardisasi	
	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Tersedianya data statistik sektoral sesuai standardisasi (yang dihasilkan dari kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan tahapan proses bisnis statistik)	
	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk.		
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.		
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral		
5.	PROGRAM : Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi		Meningkatnya kemandirian siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Laporan hasil kebijakan keamanan informasi	
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		
	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah		



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran/ Volume	Catatan
	Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		
	KEGIATAN : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Laporan hasil kebijakan keamanan informasi	-
	SUB KEGIATAN : Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Tersedianya SOP penanganan insiden, manajemen risiko, back up,dll	

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan. Usulan ini tidak ada dikarenakan Kabupaten Blitar memiliki fokus utama lainnya yang lebih prioritas untuk dijalankan pada Tahun 2026 nantinya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Renstra Kominfo dan Renstra Kominfo Provinsi)

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan ini menyangkut proses analisis dan peninjauan terhadap arah, strategi dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penjabaran ini kemudian disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah dengan tujuan keselarasan kebijakan di tingkat pusat hingga di daerah agar berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dengan adanya telaahan ini diharapkan dapat meminimalkan program dan kegiatan yang terkadang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan daerah.

Kebijakan Nasional Pemerintah Pusat Tertuang dalam Asta Cita, yaitu Program Delapan Misi Menuju Indonesia Emas 2045. Asta cita merupakan 8 misi yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Visi **“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**. adapun delapan misi dimaksud antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan nasional dan mendorong kemandirian bangsa Melalui swasembada pangan, energi, dan air, serta ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan

argomaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar berjalan sebagai motor penggerak transformasi digital di wilayah Kabupaten Blitar. Secara pelaksanaannya dengan melakukan sinkronisasi antara arah kebijakan dan program nasional dengan program dan kegiatan yang berada pada perangkat daerah. Program perangkat daerah yang dijalankan mengintervensi program prioritas astacita ke-2 dan ke-7. Adapun programnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Asta Cita 2 *“memantapkan sistem pertahanan keamanan nasional dan mendorong kemandirian bangsa Melalui swasembada pangan, energi, dan air, serta ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”*.

Asta Cita ini mengarah pada arah dan tujuan pembangunan RPJPN 2025-2045 yang salah satunya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dan Ketahanan sosial budaya dan ekologi, dimana dalam asta cita ke-2 ini terdapat stabilitas ekonomi makro, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan, serta lingkungan hidup berkualitas. Adapun kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional ini antara lain:

- a. Peningkatan Pelayanan Parsandian, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi;
 - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika;
 - Meningkatkan Pemerataan Pengetahuan dan Literasi terkait Keamanan Sistem Informasi yang Berpedoman pada Indeks Kemanan Informasi.
2. Asta Cita ke-7 *“Memperkuat reformasi politik, hukun dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan penyelundupan”*.

Asta Cita ini mengarah pada arah dan tujuan pembangunan RPJPN 2025-2045 yang salah satunya transformasi tata kelola dimana dalam asta cita ke-7 ini terdapat transformasi digital, iptek, inovasi, dan prduktifitas ekonomi, serta regulasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Adapun kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional ini antara lain:

- a. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik;
 - Meningkatkan pembangunan aplikasi sesuai standart SPBE untuk mewujudkan *e-government* terintegrasi;

- Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur;
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung *e-government*
- b. Peningkatan Komunikasi Publik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi penangkal berita hoax;
 - Meningkatkan Literasi Digital kepada Masyarakat;
 - Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat.
- c. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah;
 - Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital;
 - Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Berbagai Media;
 - Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam Penerbitan Produk Data Statistik;
 - Membangun Data Center yang baik dan Terintegrasi;
 - Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Regulasi terkait Pemanfaatan Data seluruh Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam dokumen arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2026 berpijak pada kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan merupakan bagian integral dari proses perencanaan yang sistematis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus dilakukan secara terstruktur dan berbasis bukti sebelum diturunkan ke dalam program-program prioritas tahunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029. Keselarasan antara RKPD dan RPJMD menjadi sangat penting agar pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor arah pembangunan jangka menengah dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi dengan implementasi program dan kegiatan secara nyata dilapangan. Sehingga dokumen yang telah disusun ini kemudian tidak hanya menjadi dokumen yang bersifat admistratif saja, tetapi juga menjadi instrument dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, efektifitas dan keberlanjutan. Dalam penyusunan dokumen ini sangat penting untuk memberikan penyajian Visi dan Misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, kerana ini merupakan bagian penting dalam instrument dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dalam menentukan arah kebijakan dan program sesuai dengan visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Blitar yaitu “**KABUPATEN BLITAR BERJAYA DAN BERDAYA**”, terutama pada misi ke tiga (3) yaitu *Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat*. Mengartikan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan, menyusun, dan mengaplikasikan kebijakan daerah sesuai dengan visi misi yang selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029. Visi dan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 dapat terwujud.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah melalui pernyataan visi, misi yang ingin dicapai serta untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya maka dalam pelaksanaannya sangat diperlukan adanya konsistensi perencanaan yang strategis dalam mencapai masa depan yang diinginkan. Konsistensi ini diawali dengan penetapan tujuan Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan Renstra periode 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan merupakan hasil yang diharapkan dengan memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan arahan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang ditetapkan adalah "**Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah**". Tema ini selaras dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui beberapa prioritas pembangunan, yaitu:

1. Pemerataan Konektifitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian;
3. Pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM dan Industri, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pengembangan ekonomi;
4. Pembangunan SDM yang inklusif dan perlindungan sosial yang adaptif;
5. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.

Dinas Kominfotiksan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, serta statistik dan persandian, turut melaksanakan dan mendorong pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas

Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Program Pembangunan Kabupaten Blitar. Dinas Kominfo yang mengampu 3 urusan, mendukung pencapaian prioritas pembangunan menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Dinas Kominfo wajib melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan untuk memperoleh sinkronisasi pencapaian sasaran dan efektifitas luaran melalui penyusunan RKPD yang selaras dengan RKP, dan memastikan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja juga selaras dengan dokumen di atasnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo yang didasarkan rumusan isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam satu sasaran yaitu meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE. Rencana Kerja Dinas Kominfo didasarkan pada rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat sistem keamanan informasi pemerintahan daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik berbasis *e-government*.
- c. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas informasi publik.
- d. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Kominfo yang profesional dan kredibel melalui literasi digital.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai standar SPBE dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Kominfortiksan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk merumuskan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik, penyelenggaraan E-government, statistika

sektoral dan persandian dan keamanan informasi memiliki peran penting dalam terwujudnya meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfo sesuai tercantum dalam dokumen renstra 2026-2029 adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien melalui integrasi sistem layanan publik dan administrasi pemerintah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelola data sektoral serta keamanan informasi yang terintegrasi. Selanjutnya tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 sasaran dan 5 indikator kinerja sasaran Persentase layanan publik yang sesuai dengan standar SPBE.

Table 3.1
Persentase Capaian IKU Tahun 2024 dan Target Tahun 2026
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian tahun 2024	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah,	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi Menpan RB	3.77	1,71 – 2,01
		Nilai Aspek Teknologi Digital	Nilai Aspek Teknologi Digital	4	1,71 – 2,01
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,	Meningkatnya Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	3	1,71 – 2,01
3	Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B 68,95	BB 73,5
4		Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh	92,70	93,20

		Komisi Informasi	Komisi Informasi		
5		Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,9	2,6-3,0
6		Meningkatnya Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	75 (versi 4.2) dikonversi 53 (versi 5.0)	60

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dilakukan melalui penetapan strategi dan arah kebijakan tahun 2026, yaitu:

- 1) Strategi-1: Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik;
 - Meningkatkan pembangunan aplikasi sesuai standart SPBE untuk mewujudkan *e-government* terintegrasi;
 - Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur;
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung *e-government*
- 2) Strategi-2: Peningkatan Komunikasi Publik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi penangkalan berita hoax;
 - Meningkatkan Literasi Digital kepada Masyarakat;
 - Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat.
- 3) Strategi-3: Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah;
 - Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital;

- Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Berbagai Media;
 - Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam Penerbitan Produk Data Statistik;
 - Membangun Data Center yang baik dan Terintegrasi;
 - Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Regulasi terkait Pemanfaatan Data seluruh Perangkat Daerah.
- 4) Strategi-4: Peningkatan Pelayanan Persandian, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi;
 - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika;
 - Meningkatkan Pemerataan Pengetahuan dan Literasi terkait Keamanan Sistem Informasi yang Berpedoman pada Indeks Keamanan Informasi.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026 yang dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan Dokumen Resntra selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun kedepan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Definisi operasional/ Referensi Sumber Data	Kondisi Awal Periode Renstra PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode Renstra
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan			Skor (skala 1-100)		85.55	85.6	85.7	85.8	86	86.5	
		Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Skor (skala 1-100)	Merupakan suatu kondisi dimana suatu badan publik menunjukkan peningkatan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan, mengumumkan dan melayani permintaan informasi publik secara proaktif, cepat, tepat waktu, dan transparan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 atau UU	93.00	93.20	93.50	93.80	94.00	95.00	

No	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Definisi operasional/ Referensi Sumber Data	Kondisi Awal Periode Renstra PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode Renstra	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
							KIP.Rilis Komisi Informasi Jawa Timur								
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien		Indek SPBE (ditetapkan menggunakan Pemdigi)/ Indek Pemdigi	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sehingga terwujud sistem layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi				4.38	2.6-3.0	2.65-3.1	2.65-3.1	2.7-3.2	2.7-3.2		
					Nilai Aspek Teknologi Digital (skor)	Skor (skala 0-5) sumber data : penilaian Mengan RB	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital untuk tahun 2026-2030, untuk tahun 2025 masih menggunakan indeks SPBE dengan indikator yang lama yaitu Domain Tata kelola SPBE sub Teknologi Informasi dan Komunikasi. Target pada tahun 2026 berbeda karena sudah menggunakan indeks yang baru. Target nasional untuk tahun	3,8	2.6-3.0	2.65-3.1	2.65-3.1	2.7-3.2	2.7-3.2		

No	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Definisi operasional/ Referensi Sumber Data	Kondisi Awal Periode Renstra PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode Renstra
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							2025: 3 dan 2028 : 2							
					Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (skor)	Skor (skala 0-5) sumber data : penilaian Menpan RB	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah pada Indeks Pemerintah Digital untuk tahun 2026-2030, untuk tahun 2025 masih menggunakan indeks SPBE dengan indikator yang lama yaitu pada Domain Tata kelola SPBE sub Penyelenggara SPBE. Target pada tahun 2026 berbeda karena sudah menggunakan indeks yang baru. Target nasional untuk tahun 2025: 3 dan 2028:2	3,2	2.6-3.0	2.65-3.1	2.65-3.1	2.7-3.2	2.7-3.2	

No	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Definisi operasional/ Referensi Sumber Data	Kondisi Awal Periode Renstra PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode Renstra
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai tahapan dan prinsip Satu Data Indonesia	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral.	2.6-3.0	2.6-3.0	2.65-3.1	2.65-3.1	2.7-3.2	2.7-3.2	
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks berkisar 0 hingga 100	Indeks KAMI adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) penerapan keamanan informasi pada suatu instansi, berdasarkan aspek-aspek : tata kelola, manajemen risiko, pengendalian teknologi, serta kesadaran dan budaya keamanan	75 (versi 4.2) dikonversi 55 (versi 5.0)	55 (Cukup Siap)	60 (Cukup Siap)	65 (Cukup Siap)	70 (Siap)	75 (Siap)	

No	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Definisi operasional/ Referensi Sumber Data	Kondisi Awal Periode Renstra PD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode Renstra
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Siap (66-80, Sangat Siap 81-100 Rilis BSS N	informasi. Skor 0-100 dengan sumber data dari BSSN							

tahun 2026 terjadi penyesuaian indikator dari SPBE menjadi indeks Pemerintah Digital (Pemdigi), berdasarkan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/66/PD.02/2025 Tahun 2025 tentang pembinaan kepada instansi pemerintah pada tahun 2025 dalam rangka penerapan kebijakan pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE, sehingga target ikut berubah menyesuaikan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar merencanakan 5 (Lima) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - 3. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 - 3. Penyediaan Jasa surat-menyurat

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dari 1 Kegiatan

dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Relasi Media
2. Kemitraan Komunikasi dengan komunitas Informasi Masyarakat
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi
6. Penyusunan Konten
7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

- b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
2. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
4. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
5. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
6. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
7. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
8. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
9. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
10. Penyediaan Akses Internet
11. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
12. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
13. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

14. Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota
 15. Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
 16. Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah KabKabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
 2. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 3. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 3. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana kinerja diukur menurut suatu skala atau dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu. Setiap indikator kinerja perlu didefinisikan secara jelas untuk setiap pernyataannya. Hal ini sangat penting bagi setiap OPD untuk memahami terhadap indikator kinerja yang dibuat, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan pada setiap evaluasi yang dilakukan.

Kelompok Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah masyarakat dan OPD yang berkaitan dengan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Blitar

Nama PD: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Blitar	BB 73,5	5.322.830.981,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		BB 74,5	5,376,059,290.65
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Kab. Blitar	100	51.132.647,85	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	51.558.474,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	3	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	13,000,000.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	4	29.582.647,85			4	30,008,474.33
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	1	1.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1,050,000.00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	53	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		53	7,500,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Blitar	100	4.258.264.784,80	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	4,300,847,432.52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	37	4.228.900.834,80	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37	4,271,483,482.52
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Blitar	2	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	28,000,000.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Blitar	7	1.363.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7	1,363,950.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100	90.488.126,68	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	91,393,007.94
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	37	90.488.126,68	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37	91,393,007.94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	100	273.560.041,99	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	276,381,142.40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	10	4.513.760,67	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	4,558,898.28

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	14	21.722.473,23	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	21,939,697.97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	6	92.084.844,82	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	93,080,693.27
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Blitar	8	27.725.224,28	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8	28,012,976.53
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	1	125.538.968,69	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	126,794,358.37

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Blitar	1	1.974.770,29	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1,994,518.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Kab. Blitar	100	31.936.985,89	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	32,256,355.74
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	14	31.936.985,89	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	32,256,355.74
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	100	431.149.309,46	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	435,460,802.54

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	1	66.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	66,620,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1	361.549.309,46	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	365,860,802.54
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	1	2.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2,980,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Kab. Blitar	100	186.299.084,34	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	188,162,075.17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	12	128.910.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	128,910,000.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Blitar	1	57.389.084,34	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	59,252,075.17
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Terhadap Akses dan Kualitas Kontern Informasi Publik Pemerintah Daerah (Metode Survey)	Kab. Blitar	85,60	2.062.077.990,00			85,60	2,165,181,889.50
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Kab. Blitar	93,20	2.062.077.990,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		93,50	2,165,181,889.50

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik		5				5	
	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Blitar	3	51.551.949,75	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	54,129,547.24
	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Blitar	20	41.241.559,80	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20	43,303,637.79
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Blitar	8	179.400.785,13	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8	188,370,824.39
	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan,	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik	Kab. Blitar	2	233.014.812,87	Dana Transfer Umum-Dana		2	244,665,553.51

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Opini, dan Aspirasi Publik	yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				Alokasi Umum			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Blitar	129	1.340.350.693,50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	129	1,407,368,228.18	
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Blitar	5.107	154.655.849,25	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.107	162,388,641.71	
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Blitar	64	61.862.339,70	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	64	64,955,456.69	
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Digital (Skor)	Kab. Blitar	1,71 - 2,01	5.055.743.963	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,71 - 2,01	5,308,531,160.63	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
		Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Skor)		1,71 – 2,01				1,71 – 2,0	
	KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Kab. Blitar	1	75.836.159,44	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	79,627,967.41
	SUB KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Blitar	2	75.836.159,44	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	79,627,967.41
	KEGIATAN: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	Kab. Blitar	20	4.979.907.803,06	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 kebijakan	5,228,903,193.22

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
		- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan;	Kab. Blitar	4					
		- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah;	Kab. Blitar	20					
		- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;	Kab. Blitar	20					
		- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;	Kab. Blitar	20					
		- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;	Kab. Blitar	100					
		- Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparatur dan masyarakat;	Kab. Blitar	2					
		- Persentase anggaran kegiatan	Kab. Blitar	95					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
		yang terserap secara efektif;							
	SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kab. Blitar	10	34.859.354,62	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10	36,602,322.35
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Blitar	4	149.397.234,09	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	151,638,192.60
	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Blitar	52	24.899.539,02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52	26,144,515.97
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	Kab. Blitar	4	149.397.234,09	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	151,638,192.60

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
		Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional							
	SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Blitar	1	39.839.262,42	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	41,831,225.55
	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Blitar	4	149.397.234,09	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	151,638,192.60
	SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kab. Blitar	4	388.432.808,64	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	381,709,933.10

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Aplikasi Umum SPBE								
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Kab. Blitar	1	149.397.234,09	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	151,638,192.60
	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	5	24.899.539,02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	26,144,515.97
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		52	3.286.739.150,02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52	3,294,209,011.73
	SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana	Kab. Blitar	4	189.236.496,52	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	193,469,418.15

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah							
	SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	Kab. Blitar	4	229.075.758,94	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	230,071,740.50
	SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Blitar	4	39.839.262,42	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	41,831,225.55
	SUB KEGIATAN: Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Kab. Blitar	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	151,638,192.60
	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar	Kab. Blitar	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	73,204,644.71

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	sektor prioritas dan UMKM								
	SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Kab. Blitar	4	124.497.695,08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	125,493,676.64
4	PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart (%)	Kab. Blitar	97	815.000.000,00	Dana Transfer		97	820,000,000.00
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	Kab. Blitar	97	815.000.000,00	Umum-Dana		97	820,000,000.00
	SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Blitar	100	122.250.000,00	Alokasi Umum		100	123,000,000.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk.	Kab. Blitar	100	122.250.000,00	Dana Transfer		100	123,000,000.00
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Blitar	100	146.700.000,00	Umum-Dana		100	147,600,000.00
	SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Blitar	126	301.550.000,00	Alokasi Umum		126	303,400,000.00
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kab. Blitar	100	122.250.000,00	Dana Transfer		100	123,000,000.00
5	PROGRAM : Penyelenggaraan Persandian dan	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Blitar	60	365.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		65	370,000,000.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
	Pengamanan Informasi					Alokasi Umum			
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Kab. Blitar	2	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	305,000,000.00
	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Blitar	1	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	35,000,000.00
	SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Blitar	52	230.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		52	235,000,000.00
	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa	Kab. Blitar	2	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	35,000,000.00

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
		Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian							
	KEGIATAN : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Kab. Blitar	55%	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		55%	65,000,000.00
	SUB KEGIATAN : Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kab. Blitar	12	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	65,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar mengampu tiga urusan pemerintahan daerah yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026, maka Dinas Koinfo Kabupaten Blitar pada tahun 2026 merencanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 5 program, 13 kegiatan, dan 51 sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp13.620.652.933,50,-

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koinfo Tahun 2026, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap Bidang, serta Kebijakan alokasi anggaran yang telah di tetapkan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagai representasi kontribusi berdasarkan urusan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Adapun rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan RKPD Kab.Blitar Tahun 2026 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Table 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2026
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Poin	BB 73,5	5.322.830.981,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika (Sekretariat)
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Persen	100	51.132.647,85	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	13.000.000,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	29.582.647,85	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1.050.000	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	Data	53	7.500.000	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persen	100	4.258.264.784,80	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	4.228.900.834,80	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	-	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	2	28.000.000,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7	1.363.950,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	90.488.126,68	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika (Sekretariat)

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	37	90.488.126,68	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	273.560.041,99	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika (Sekretariat)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	4.513.760,67	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	21.722.473,23	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	92.084.844,82	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	27.725.224,28	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	125.538.968,69	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.974.770,29	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Persentase	100	31.936.985,89	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	31.936.985,89	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	431.149.309,46	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	66.620.000,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	361.549.309,46	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.980.000,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Persentase	100	186.299.084,34	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika (Sekretariat)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	128.910.000,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	57.389.084,34	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	Nilai	85,60	2.062.077.990,00	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Nilai (skala 1-100)	93,20	2.062.077.990,00	(Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)
	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Nilai (skala 1-5)	5		

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kegiatan	3	51.551.949,75	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	KIM	20	41.241.559,80	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	8	179.400.785,13	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2	233.014.812,87	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	129	1.340.350.693,50	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	5.107	154.655.849,25	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	64	61.862.339,70	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Aspek Teknologi Digital (Skor)	Nilai	1,71 - 2,01	5.055.743.963	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika (Bidang Aplikasi Informatika)
	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah (Skor)	Nilai	1,71 - 2,01		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Dokumen	1	75.836.159,44	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	2	75.836.159,44	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
KEGIATAN: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	Persentase	20	4.979.907.803,06	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
	- Jumlah aplikasi atau layanan digital yang dikembangkan atau ditingkatkan;	layanan	4		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
	- Tingkat adopsi layanan digital oleh aparatur pemerintah;	Persentase	20		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
	- Persentase layanan digital yang memenuhi standar manajemen layanan digital;	Persentase	20		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	- Persentase layanan digital yang memiliki hak cipta;	Persentase	20		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
	- Waktu rata-rata penyelesaian gangguan teknis sistem layanan digital;	Jam	100		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
	- Jumlah pelatihan atau sosialisasi layanan digital untuk aparatur dan masyarakat;	Kegiatan	2		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
	- Persentase anggaran kegiatan yang terserap secara efektif;	Persentase	95		PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	10	34.859.354,62	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	4	149.397.234,09	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	52	24.899.539,02	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	4	149.397.234,09	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN : Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	1	39.839.262,42	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	4	149.397.234,09	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	4	388.432.808,64	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan	1	149.397.234,09	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	5	24.899.539,02	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN : Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	52	3.286.739.150,02	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	4	189.236.496,52	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	Dokumen	4	229.075.758,94	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	4	39.839.262,42	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah start-up digital yang dibina di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit	0	-	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blitar	Persentase	0	-	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN: Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang	4	124.497.695,08	PD Pengampu urusan komunikasi dan informatika
PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart (%)	Persen	97	815.000.000,00	PD pengampu urusan Statistik
KEGIATAN : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standart	Persen	100	815.000.000,00	PD pengampu urusan Statistik

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN : Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persen	100	122.250.000,00	PD pengampu urusan Statistik
SUB KEGIATAN : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	100	122.250.000,00	PD pengampu urusan Statistik
SUB KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persen	100	146.700.000,00	PD pengampu urusan Statistik

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	126	301.550.000,00	PD pengampu urusan Statistik
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persen	100	122.250.000,00	PD pengampu urusan Statistik
PROGRAM : Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Skor	60	365.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian
KEGIATAN : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Dokumen	2	300.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	35.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian
SUB KEGIATAN : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	52	230.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	2	35.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian
KEGIATAN : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Persen	55%	65.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SUB KEGIATAN : Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	12	65.000.000,00	PD pengampu urusan Persandian

BAB V PENUTUP

Seiring makin stabil dan mantapnya perkembangan ekonomi daerah dan dinamika sosial daerah Kabupaten Blitar, maka Pemerintah Daerah makin agresif dalam melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada makin berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Dinas Kominfotiksan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang peningkatan pelayanan publik berbasis TIK. Implementasi TIK memberikan jaminan efektifitas, kepastian dan efisiensi pelayanan publik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Penerapan e-government yang semakin massif di dalam tata kelola pemerintahan mendorong kebutuhan perlunya dukungan kapasitas dan jaringan infrastruktur TIK yang semakin baik. Dalam situasi ini yang tidak boleh terlupakan adalah keberlanjutan usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Dimana poin ini menjadi fokus utama dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam rangka audit kinerja tahun 2026. Melalui e-government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat menjadi maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja Dinas Kominfotiksan di tahun 2026 ini tentu mendapati berbagai hambatan dan tantangan selain terkait perubahan eksternal, perubahan kebijakan dari pusat, terbatasnya SDM , antara lain bahwa saat ini kompetensi aparatur Diskominfo masih kurang sesuai standar, sehingga didalam internal Dinas Kominfo sendiri akan melakukan bimtek terkait teknologi sehingga semua aparatur akan memiliki kompetensi yang sama dan sesuai standar. Serta isu-isu lain yang sekiranya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kominfotiksan, sudah sepatutnya Dinas Kominfo peka dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan. Melalui penyusunan rencana kerja Dinas Kominfotiksan tahun

2026 ini diharapkan bahwa tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien melalui integrasi sistem layanan publik dan administrasi pemerintah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelola data sektoral serta keamanan informasi yang terintegrasi tetap dapat terwujud.

Selanjutnya jika di dalam perencanaan program dan kegiatan terdapat ketidaksesuaian baik dikarenakan situasi tertentu sehingga menyebabkan dilakukannya perubahan struktural ataupun perubahan lainnya termasuk realokasi/refocusing anggaran maka Dinas Komunikasi dan Informatika tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Kaidah-kaidah :

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya yang tersedia;
1. Memperhatikan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
2. Permasalahan yang ada dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang ingin dicapai;
4. Kebijakan, sasaran dan prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan;
5. Prioritas tema pembangunan pemerintah saat ini untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Selanjutnya dalam rangka tindak lanjut daripada rencana kerja tahun 2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di sisi lain melebihi target yang

telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target.

Sebagai penutup apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kedepannya diharapkan untuk lebih intens dalam peningkatan kualitas perencanaan sehingga perangkat daerah mampu untuk mencapai target kinerja program maupun kegiatan dan memiliki kualitas indikator kinerja yang jauh lebih baik dan smart.

Blitar, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BLITAR



NIERMAN WIDODO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 001